



## Apa itu EITI?

EITI atau *Extractive Industries Transparency Initiative* adalah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara).



## Latar Belakang

Gelombang yang menuntut transparansi di sektor industri ekstraktif terjadi di awal tahun 2000an. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menuntut transparansi tentang konflik di Angola dimana terjadi penggelapan penerimaan negara dari sektor minyak yang dilakukan elit negara tersebut. Dorongan untuk transparansi ini direspon sejumlah pihak termasuk Bank Dunia. Perdana Menteri Inggris saat itu Tony Blair memulai prakarsa transparansi di sektor industri ekstraktif atau EITI, di forum *World Summit for Sustainable Development*, Johannesburg, 2002. Gelombang transparansi menciptakan koalisi global dari unsur pemerintah, korporasi, organisasi masyarakat sipil, investor serta institusi finansial internasional. Perwakilan-perwakilan lembaga tersebut duduk di dalam Dewan EITI Internasional (*EITI International Board*).

Di Indonesia, prakarsa ini dimulai tahun 2007 ketika Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani menyatakan dukungan bagi EITI. Wakil Ketua KPK pada saat itu, Erry Riyana Hardjapamekas dan Deputi KPK untuk Pencegahan Waluyo meninjau persiapan dasar hukumnya. Tahun berikutnya, Menko bidang Perekonomian saat itu, Boediono, memimpin rapat koordinasi untuk EITI, dan akhirnya di tahun 2010 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden no 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. Indonesia secara resmi diterima sebagai kandidat negara pelaksana EITI pada Oktober 2010.

## Fakta Tentang EITI:

- EITI bertujuan memperkuat sistem pemerintahan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif. EITI menetapkan standar internasional bagi pelaku usaha untuk melaporkan pembayaran dan bagi pemerintah untuk membuka angka penerimaan negara.
- EITI adalah sebuah koalisi antara Pemerintah, Pelaku Usaha, Kelompok Masyarakat Sipil, Penanam Modal dan Organisasi Internasional. Perwakilan-perwakilan lembaga tersebut duduk di dalam satu Dewan Internasional (*EITI International Board*).
- Di Indonesia, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010, pelaksanaan EITI berada dibawah tanggung jawab Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang memimpin Tim Pengarah Transparansi dan dijalankan oleh sebuah Tim Pelaksana Transparansi yang terdiri dari perwakilan pemerintah, masyarakat sipil dan industri, dan diketuai oleh Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Tim pengarah menyampaikan laporan kepada Presiden secara berkala satu kali dalam setahun.
- Standar EITI telah dilaksanakan di 52 negara di dunia. Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang memperoleh status *compliance* atau patuh standar transparansi.



## Cara Kerja EITI



## Manfaat Transparansi

- Dari sudut pandang Pemerintah, transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah karena publik dapat melakukan *check and balance* demi perbaikan sektor ini.
- Dari sudut pandang bisnis, transparansi akan memberikan informasi yang setara kepada semua pihak sehingga pelaku bisnis akan berkompetisi secara sehat untuk memberikan kemanfaatan yang optimal bagi negara.
- Dari kacamata masyarakat, transparansi dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang sumber daya alam yang dieksploitasi dari wilayahnya sehingga dapat memantau apakah pengelolaan sudah sesuai dan memberikan manfaat.

## Pencapaian dan Perkembangan EITI Indonesia

- Indonesia telah empat kali mempublikasikan Laporan EITI yang mencakup informasi penerimaan negara di sektor ekstraktif dari tahun 2009 hingga 2014. Saat ini sedang dalam proses penyelesaian Laporan EITI 2015. Laporan EITI menyajikan sejumlah temuan dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia.
- EITI adalah salah satu inisiatif yang ikut mendukung Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)

bersama-sama instansi lain yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden, (KSP), Bappenas, dan instansi lainnya.

- EITI telah meluncurkan roadmap *Beneficial Ownership* (BO) di akhir tahun 2016. BO yaitu orang atau sekelompok orang yang secara langsung atau tak langsung memiliki atau mengontrol perusahaan/industri. Diharapkan tahun 2020 data BO (nama, domisili, kewarganegaraan) dari perusahaan-perusahaan ekstraktif di Indonesia dapat dibuka. Pembukaan data BO dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran seperti manipulasi pajak, pencucian uang, pendirian perusahaan fiktif, dan monopoli terselubung. EITI bekerjasama dengan berbagai instansi yaitu KPK, KSP, Bappenas, PPATK, Ditjen Pajak dll dalam upaya transparansi data BO.
- Indonesia menjadi satu dari delapan negara anggota EITI yang menjadi negara pilot dalam transparansi *commodity trading*. Pilot ini sebagai dasar EITI Internasional untuk menerapkan standar transparansi di sektor perdagangan migas yang salah satunya untuk memahami faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga migas.
- EITI Indonesia di tingkat pusat telah melakukan serangkaian upaya agar pelaksanaan standar EITI juga dilaksanakan di tingkat daerah.

### Sekretariat EITI Indonesia

Gedung Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian, Lt. 2,

Jl. Medan Merdeka Barat No.7, Jakarta 10110

Telp: [+62 21 3483 2642](tel:+622134832642) | Fax: [+62 21 3483 2658](tel:+622134832658)

<http://eiti.ekon.go.id>